

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerapan *corporate governance* yang lemah di Perbankan Indonesia menyebabkan bank Indonesia terus mengalami pasang surut. Dari data-data hasil survey perbankan Indonesia ditemukan adanya kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia, hal ini juga disebabkan karena pengawasan internal bank dan pengawasan dari manajemen tertinggi (*top management*) bank yang lemahnya (Media Indonesia.com). Fakta yang menjadi indikasi lemahnya sistem tersebut dapat diamati dari sedikitnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, implementasi kebijakan sistem dan prosedur serta Sumber Daya Manusia, karena kurang menerapkan prinsip *Know Your Employee*, dalam meningkatkan efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*, maka diperlukan sistem pengelolaan perbankan yang memiliki mekanisme kerja tersistematis, restrukturisasi dan rekapitalisasi (Budiarti, 2010).

Apakah *corporate governance* masih menjadi masalah dalam bisnis yang terjadi di Asia baru-baru ini? Ini merupakan suatu pertanyaan yang menarik bahwa ekonom dan para pembisnis sangat konsern terhadapnya, meskipun sudah lebih dari sepuluh tahun krisis di Asia terjadi. Pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan disebabkan lemahnya penerapan *corporate governance*. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Dalam kuartal I 2011 tercatat di *Strategic* Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri(Kompas.com Selasa,3/5/2011) telah terjadi 9 jenis kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan anantara lain :

1. Terlibat *supervisor* kantor kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square dibantu empat tersangka dari luar bank. Modus adalah transfer uang ke rekening sebesar 6 juta dollar AS. Dan dilakukan penukaran dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Kasus yang melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Dengan Pemberian kredit menggunakan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011, sehingga menyebabkan kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Kasus Bank Mandiri pada 1 Februari 2011 yang melibatkan lima tersangka, diantaranya ada salah satunya *customer service* bank tersebut. Dengan modusnya adalah pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah dengan memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka.
4. Kasus Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok, dimana seorang wakil pimpinan sebagai tersangka dengan mengirim berita *teleks* palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
5. Terlibatnya Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank, melakukan pencairan deposito sebesar Rp 6 miliar milik dari nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi

Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dananya.

6. Modusnya *head teller* pada Bank Danamon Cabang Menara Pada 9 Maret dengan modus penarikan uang kas nasabah secara berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
7. Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 2,5 miliar dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi.
8. Senior *Relationship Manager* (RM) bernama Inong Malinda Dee dari Citibank *Landmark* melakukan pembobolan uang nasabah prioritas senilai Rp 16,63 miliar, tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.
9. Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Melakukan konspirasi kecurangan investasi atau deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi.

Menurut Budiarti (2010), krisis perbankan di Indonesia dimulai akhir tahun 1997. Krisis tersebut tidak diakibatkan oleh krisis ekonomi semata-mata tetapi diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha untuk mengembalikan kepercayaan terhadap dunia perbankan Indonesia ada tiga tindakan penting yang dilakukan yaitu ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan CG dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank. Pelaksanaan CG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Sistem restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat memiliki dampak jangka panjang

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan dalam rentang waktu 5 - 10 tahun ke depan. Pada tahun 2004, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). API terdapat enam pilar utama sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Keseriusannya terhadap isu CG, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/pojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *corporate governance*, bagi bank umum.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan sistem *corporate governance*, sehingga dapat memperbaiki sistem perbankan yang sehat dan diharapkan dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Citra perbankan yang buruk dalam melindungi kepentingan *stakeholders* dapat ditingkatkan. Pada dasarnya *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada professional managers. Akibatnya, kewenangan



untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

*Corporate governance* memiliki konsep dasar *agency theory*. CG diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Berkaitan dengan masalah *agency*, *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Darmawati dkk., 2004).

Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*). Sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut. Jika manajemen terpisah dari pemilik, akan memunculkan permasalahan tentang bagaimana pemegang saham dapat secara efektif memonitor pengurusan perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Untuk itu dilahirkan lembaga Komisaris, partisipasi pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham), peran menentukan kompensasi Direksi yang dikaitkan dengan kinerja, perlindungan hukum, transparansi, dan kewajiban *disclosure*, termasuk hak pemegang saham minoritas.

Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. *Corporate governance* membutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut (Walsh dan Seward, 1990).

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *eksternal mechanism* (Iskandar & Chamlaio, 2000). *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar (Iskandar & Chamlaio, 2000). Pengawasan merupakan bagian integral dari proses manajemen. Mengawasi berarti melihat dan memperhatikan apakah yang dilaksanakan (kenyataan) sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan (rencana).

Penelitian mengenai hubungan *corporate governance* dan kinerja perusahaan dengan menggunakan index penilaian *corporate governance* maupun struktur (mekanisme) *corporate governance* telah banyak dilakukan. Darmawati,

dkk (2005) meneliti hubungan antara corporate governance dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survey IICG dan majalah SWA tentang implementasi GCG dalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai proksi variabel *corporate governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi dengan kinerja keuangan (*Return on Equity/ROE*) dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* secara statistik signifikan mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Sukamulja (2004) meneliti dampak *corporate governance* terhadap kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja yang tercermin dari nilai pasar perusahaan dilihat dari segi profitabilitas, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menemukan perbedaan dalam praktik *corporate governance* perusahaan di berbagai industri, khususnya di pasar negara berkembang.

Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme *corporate governance* mengenai mekanisme pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Direksi. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Komite Audit. Kepemilikan institusional yang besar akan mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar di dalam suatu perusahaan. Selain itu kepemilikan mayoritas bisa saja mengabaikan kepentingan pemilik saham minoritas sehingga dalam pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas lebih dominan dan unggul. Kepemilikan manajerial yang besar akan

menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Sifat *self interest* pada umumnya dimiliki oleh semua manusia sehingga manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan *stakeholders* agar kinerja perusahaan disini terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Hal ini karena jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dalam hal pengawasan. Sedangkan jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Ketika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik maka tugas pengawasan menjadi lebih baik sehingga kinerja perbankan meningkat. Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Arbaina (2012), membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* pada perbankan di Indonesia kurang maksimal. Faktor yang mendorong tidak diterapkan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia secara maksimal karena pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, serta independensi tidak sepenuhnya diterapkan. Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets (ROA)* dan *Tobin's Q*. Darmawati, dkk (2004) dan Nuswandari (2009) menemukan adanya hubungan



positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Amyulianthy (2012) membuktikan bahwa *corporate governance* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi *Tobin's Q* diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi

Sayidah (2007), menemukan bukti bahwa kualitas *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perbankan. Puspitasari dan Ernawati (2010) melaporkan bahwa *ROA, ROE, PER dan Tobin's Q* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corporate governance* (kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan). Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan konsep indikator mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari mekanisme pemantauan kepemilikan meliputi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi. Pemantauan Mekanisme dilakukan melalui pengungkapan kinerja Komite Audit terhadap kinerja yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Ukuran kinerja digunakan ROA sebagai indikator. ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktivitas.

Mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menjembatani konflik keagenan sehingga memungkinkan terjadi peningkatan kepercayaan investor dan kreditor untuk melakukan investasi

pada perusahaan dengan harapan perusahaan akan memberikan *return* maksimal dari modal yang ditanamkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas dapat dibuat beberapa rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah kinerja perbankan dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance* secara simultan?
2. Apakah kinerja perbankan dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran direksi dan komite audit?
3. Apakah kinerja perbankan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu untuk :

1. Menguji pengaruh positif dari mekanisme *corporate governance* secara simultan memberi terhadap kinerja perbankan.
2. Menguji pengaruh positif ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran direksi, komite audit terhadap kinerja perbankan
3. Menguji pengaruh negatif kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi Perbankan

Mengetahui mekanisme *corporate governance* pada perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dan juga membantu direksi menjabarkan kerangka dalam menetapkan kebijakan ataupun keputusan strategik.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan analisis yang baik tentang perbandingan mekanisme *corporate governance* pada industri perbankan Indonesia. Serta, memberi kontribusi sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian sejenis.

c. Bagi Praktisi

Dipraktekkan dan dipertimbangan sebagai salah satu sarana perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang tinggi sesuai dengan harapan sehingga bisa menjadi kiblat dalam standar prosedur yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga tercapainya keunggulan kompetitif.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini diantaranya:

Pada Bab I Pendahuluan diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II Tinjauan Literatur yang mana pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Pada Bab III Metode Penelitian dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari metode penelitian ini adalah variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pada Bab IV Analisis Hasil Penelitian dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian dan interpretasi hasil

Pada Bab V Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran, Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

